©2023by author(s)
Vol. 7, No. 1, pp. 22-50.
DOI: 10.32787/ijir.v7i1.423

PERAN ASEAN DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN MYANMAR MELALUI KESEPAKATAN *ASEAN FIVE POINT CONSENSUS*

Aviscenna Maulana Ar Rasyid
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, Indonesia
aviscennamaulana@gmail.com

Najamuddin Khairur Rijal
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, Indonesia
nkhairurrijal@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received
18 December 2022

Revised
22 February 2023

Accepted
26 February 2023

Keywords:
ASEAN, ASEAN five-point consensus, humanitarian crisis, intergovernmental organisations, Myanmar.

Kata Kunci:
ASEAN; *lima-poin konsensus* ASEAN*; krisis kemanusiaan; organisasi antarpemerintah; Myanmar*.

Abstract
This article aims to discuss the role of ASEAN in dealing with the humanitarian crisis after the 2021 coup in Myanmar through the ASEAN Five Point Consensus agreement. The discussion is carried out using the concept of ASEAN as an intergovernmental organization and a qualitative descriptive research method with primary and secondary sources from literature studies. The results of the study show that ASEAN has carried out its role as a regional organization, one of which has produced a consensus, namely the ASEAN Five Point Consensus in dealing with the situation in Myanmar. However, ASEAN experienced obstacles because the Myanmar military junta regime did not show good faith in respecting the points of agreement, making it difficult for ASEAN to play a role in resolving the humanitarian crisis in Myanmar. In conclusion, ASEAN has carried out its role as a regional organization as theorized, except for forcing its members to comply with set rules.

Abstrak
Artikel ini bertujuan membahas bagaimana peran ASEAN *dalam menangani krisis kemanusiaan pasca kudeta tahun 2021 di Myanmar melalui kesepakatan* ASEAN *Five Point Consensus. Dibahas dengan menggunakan konsep* ASEAN *sebagai organisasi antarpemerintah dan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber primer dan sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa* ASEAN *telah melakukan perannya sebagai organisasi regional yang salah satunya menghasilkan konsensus, yaitu* ASEAN *Five Point Consensus dalam mengatasi situasi di Myanmar. Namun* ASEAN *mengalami hambatan karena rezim junta militer Myanmar tidak menunjukkan itikad baik untuk menghormati poin-poin kesepakatan tersebut sehingga membuat* ASEAN *kesulitan untuk berperan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Simpulannya, ASEAN telah melakukan peran sebagai organisasi regional seperti apa yang diteorikan, kecuali memaksa pada anggotanya untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan.*

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Penanggulangan krisis di suatu negara, baik itu krisis politik, kemanusiaan, ekonomi, maupun hal lain sebagainya, komunitas internasional sudah sewajarnya untuk menanggapi krisis yang terjadi, salah satunya yaitu dengan adanya peran yang dilakukan oleh organisasi regional yang menaungi negara tersebut untuk membantu agar krisis yang terjadi dapat segera diatasi sekaligus untuk mencegah bilamana krisis serupa tidak dapat menyebar ke negara anggota lainnya yang dapat memengaruhi stabilitas politik, keamanan, sosial, maupun ekonomi pada suatu kawasan yang dinaungi oleh organisasi regional yang ada. Hal ini dilakukan karena suatu negara tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pergaulan dengan dunia internasional seperti negara lain atau organisasi internasional. Salah satu contoh krisis yang terjadi pada suatu negara yaitu adanya krisis kemanusiaan pasca kudeta militer di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021.

Myanmar secara geografis terletak pada kawasan Asia Tenggara dan merupakan anggota tetap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*/ASEAN) sejak tahun 1997 (Ariffin & Mohd Mahdzir, 2021). Negara tersebut juga beberapa kali mengalami ketidakstabilan politik dan krisis kemanusiaan yang sudah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, krisis yang terjadi pada tahun 2021 dapat memengaruhi bahkan mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara dan organisasi ASEAN sendiri, yang kemudian memutuskan untuk mengambil sikap dengan mengeluarkan suatu konsensus terkait krisis kemanusiaan pasca kudeta yaitu *ASEAN Five Point Consensus* (Manurung, 2021).

Pengambilan sikap dengan konsensus tersebut berdasar pada pendekatan yang diterapkan oleh ASEAN yaitu "ASEAN Way" yang berarti pendekatan pengambilan keputusan. ASEAN Way sendiri mengacu pada praktik masyarakat Melayu di pedesaan yang selalu mengutamakan dialog dan penetapan konsensus dalam menyelesaikan suatu masalah. Penetapan konsensus tersebut yaitu karena ASEAN memiliki prinsip non interferensi yang melarang setiap negara anggota untuk turut campur permasalahan internal anggota lainnya sesuai yang termaktub pada Pasal 2 *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) 1976 dan Pasal 2 Piagam ASEAN 2007 (Cuyvers, 2019).

Pada 1 Februari 2021, terjadi kudeta terhadap pemerintahan sah yang dilakukan oleh kelompok militer Myanmar yang

dikenal sebagai Tatmadaw dan dipimpin oleh panglima Jenderal Ming Aung Hlaing di ibu kota negara, Naypyidaw. Peristiwa tersebut membuat pemimpin *de facto* negara tersebut, Aung San Suu Kyi, dilengserkan dan ditahan oleh Tatmadaw, yang kemudian mendeklarasikan diri mereka sebagai rezim junta militer (National Public Radio, 2021). Penyebab terjadinya kudeta ini bermula ketika kubu militer menuding adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan November 2020 (Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021), yang disebabkan oleh kuatnya legitimasi militer dalam dinamika politik negara tersebut yang telah mengakar sejak lama sekalipun telah memasuki era transisi menuju demokrasi sejak 2011 (Stokke, 2019).

Ini bukan kejadian pertama kalinya bagi kubu junta militer dalam mengendalikan kontrol atas pemerintahan negara tersebut. Kejadian yang dimaksud terjadi pada tahun 1962, ketika seorang jenderal militer Tatmadaw yaitu Jenderal U Ne Win, merebut kekuasaan dari pemimpin yang terpilih secara demokratis yaitu U Nu (Perry, 2021). Kudeta tersebut, kemudian membuat militer memperluas kekuasaan mereka dan mengantarkan negara itu memasuki apa yang disebut sebagai 'periode kegelapan' karena situasi perekonomian dan juga politik telah mengalami titik yang paling rendah walaupun negara tersebut belum lama memerdekakan diri dari Britania Raya pada tahun 1948 silam (Thawnghmung & Noah, 2021; The Irrawaddy, 2021).

Adanya peristiwa kudeta tersebut menjalar ke beberapa aspek seperti kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena pasca Tatmadaw mengumumkan kekuasaan negara tersebut sudah diambil alih, maka tindakan tersebut membuat ribuan masyarakat dari berbagai lapisan, terutama para pendukung partai National League for Democracy (NLD), turun ke jalan termasuk ke kawasan utama di kota Yangon. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemerintahan junta militer dan tuntutan untuk membebaskan Aung San Suu Kyi (Al Jazeera, 2021; Ra, Kham, Barbesgaard, Franco, & Vervest, 2021). Rezim junta militer kemudian merespon perlawanan masyarakat tersebut dengan melakukan berbagai tindakan represif dengan menggunakan senjata tajam, gas air mata, dan *water cannon*, yang kemudian merenggut nyawa kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, masyarakat yang berdemonstrasi tidak melakukan tindakan yang memicu

perselisihan dengan aparat keamanan (Lukito, Cui, Hu, Lee, & Ozawa, 2022).

Salah satu tindakan represif yang menjadi sorotan berbagai kalangan yaitu tewasnya seorang demonstran remaja bernama Ma Kyal Sin atau yang dikenal sebagai Angel. Ia tertembak oleh aparat keamanan pada saat berpartisipasi dalam demonstrasi di kota asalnya, Mandalay pada 3 Maret 2021 (Reuters, 2021a).

Tewasnya Angel dalam gerakan demonstrasi tersebut hanyalah satu dari beberapa tindakan represif rezim junta militer usai kudeta 1 Februari yang merupakan tindakan yang mengarah menuju kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan dapat dituntut pada pengadilan internasional menurut Statuta Roma 1988 (Rae, 2022). Dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan represif yang diarahkan pada demonstran tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat memicu krisis kemanusiaan di suatu negara, dalam kasus penelitian ini merujuk pada Myanmar.

Krisis kemanusiaan di negara tersebut telah mengundang berbagai sorotan berupa kecaman maupun keprihatinan dari berbagai pihak terutama dari komunitas internasional. Salah satunya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang merupakan organisasi regional membawahi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Sirijintana, 2022).

Seperti yang dikutip dari situs resmi ASEAN, Ketua ASEAN mengeluarkan dua pernyataan resmi terkait situasi yang terjadi di Myanmar. Pernyataan pertama terhadap situasi pasca kudeta militer dirilis pada 1 Februari 2021 atau tepat pada hari kubu militer melakukan kudeta di ibu kota Naypyidaw. Pernyataan bahwa ASEAN terikat penuh pada poin yang tertuang dalam Piagam ASEAN, penegasan atas pentingnya stabilitas politik di kawasan, serta mendorong pelaksanaan dialog dan rekonsiliasi kepada semua pihak yang terlibat (Association of Southeast Asian Nations, 2021a).

Pernyataan kedua terkait dengan memburuknya situasi krisis kemanusiaan di Myanmar yang dirilis pada tanggal 2 Februari 2022. ASEAN menyatakan bahwa mereka tetap prihatin atas apa yang telah terjadi di Myanmar setahun pasca kudeta militer. Selain itu ASEAN juga mendesak Myanmar agar melakukan tindakan nyata sebagai wujud mematuhi poin yang tertuang pada ASEAN *Five Point Consensus* seperti yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada Pertemuan Pemimpin ASEAN (ASEAN *Leaders' Meeting*/ALM) di Jakarta

pada tanggal 21 April 2021 (Association of Southeast Asian Nations, 2022b).

Walaupun para pemimpin ASEAN telah menyepakati pemberlakuan ASEAN *Five Point Consensus* pada saat pertemuan tersebut, namun hal tersebut membuat rezim junta militer memperparah segala bentuk kekejaman (*atrocities*) yang dapat mengancam hak-hak kemanusiaan di negara tersebut alih-alih menghormati kesepakatan yang telah dibuat (Ambarwati, 2022; Quinn, 2022). Tindakan yang diperbuat oleh rezim junta militer tersebut telah menunjukkan bahwa mereka tetap berpendirian sama dan tidak menghormati kesepakatan yang telah ada yang tentu dapat berimbas pada stabilitas kawasan (Arifin, 2022).

Sebenarnya, pasca ditetapkannya kesepakatan konsensus tersebut, beberapa pihak merasa skeptis akan keberhasilan lima poin konsensus tersebut. Terutama seperti yang diutarakan oleh sebuah lembaga kajian *Burma Human Rights Network* (BHRN) yang berbasis di Inggris. Lembaga ini berkeyakinan jika konsensus yang ditetapkan pasca KTT ASEAN tidak akan pernah berlaku secara optimal karena sama sekali tidak menyinggung tentang pembebasan para tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi dan juga jaminan pelaksanaan demokrasi (Kusumawardhana, 2022).

Secara sederhana, pemaparan singkat tersebut bermakna bahwa penerapan konsensus tersebut tidak optimal dan peran yang dijalankan ASEAN hanya sekedar omong kosong belaka (Widayat & Surwandono, 2022). Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam terkait peran yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar melalui kesepakatan ASEAN *Five Point Consensus.*

Terkait mengenai hirauan yang sama, Putri, Nugraha, dan Akbar (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa krisis politik yang bermula dari sengketa hasil pemilihan umum tahun 2020 di Myanmar kemudian memicu pecahnya kudeta oleh kelompok militer pada bulan Februari 2021. Hal ini membuat masyarakat melakukan protes sebagai gestur ketidaksukaan terhadap rezim yang baru berkuasa yang kemudian dibalas oleh pasukan militer dengan serangkaian tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM. Sebagai negara anggota, peristiwa yang terjadi lalu menyeret ASEAN terpaksa mengambil tindakan berupa penetapan konsensus yang menjadi alat untuk menyelesaikan krisis HAM di di Myanmar.

Salah satu instrumen penyelesaian krisis tersebut yaitu dengan menugaskan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). Namun, peranan AICHR mengalami hambatan dan terkesan kurang efektif dikarenakan keterbatasan *Term of Reference* (ToR) dari komisi tersebut dan juga prinsip non-interferensi yang telah lama dianut oleh ASEAN (R. H. Putri, Nugraha, & Akbar, 2022).

Djuyandi, Sudirman, dan Darmawan (2021) dalam penelitiannya memaparkan bahwa terjadinya kudeta militer di Myanmar membuat ASEAN berada pada posisi dilema yang membatasi organisasi tersebut untuk bertindak lebih jauh. ASEAN juga dikatakan secara eksplisit berusaha untuk tidak mengkritik Myanmar secara langsung dikarenakan terikat oleh prinsip non-interferensi dan hanya dapat bertindak berdasarkan lampu hijau dari seluruh negara anggota. Keterbatasan yang ada pada ASEAN menunjukkan jika kepemimpinan yang ada tidak dapat memberikan contoh untuk bersatu dalam menyelesaikan isu di kawasan. Hal tersebut semakin menunjukkan jika kegagalan ASEAN menjadi salah satu alasan mengapa rezim otoriter seperti di Myanmar tumbuh subur (Djuyandi, Sudirman, & Darmawan, 2022).

Muhammad dan Sahide (2022) mengemukakan jika ASEAN berusaha untuk menerapkan pendekatan konstruktif terhadap Myanmar pasca kudeta militer bulan Februari 2021. Namun, upaya yang dilakukan oleh ASEAN tersebut tetap dianggap kurang efektif akibat prinsip non-interferensi terhadap urusan internal negara anggota. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut, ASEAN dipandang perlu untuk menyadari bahwa untuk mencapai tujuan stabilitas kawasan, diperlukan penghormatan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum dalam jurisdiksi negara masing-masing. Selain itu, ASEAN secara perlahan untuk memperkenalkan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dan bertindak tegas terhadap rezim junta militer (Muhammad & Sahide, 2022).

Memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu di atas, artikel ini juga membahas topik yang sama, yaitu pengambilan sikap ASEAN pasca pecahnya kudeta militer di Myanmar, hanya saja dengan menekankan sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ASEAN, dalam hal ini bertindak sebagai organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organisations*), dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang

diakibatkan oleh kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 melalui sebuah konsensus yang disepakati oleh semua negara anggota yang disebut sebagai ASEAN Five Point Consensus.

KERANGKA KONSEPTUAL

ASEAN Sebagai *Intergovernmental Organisation* (IGO)

Intergovernmental Organisation (IGO) atau disebut sebagai organisasi antarpemerintah, merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya hanya terdiri atas negara yang berdaulat. Organisasi ini pada umumnya didirikan berdasarkan pada perjanjian atau traktat yang bersifat multilateral (McCormick, 1980).

IGO sendiri juga kadang-kadang mengacu pada *International Organisation* (IO) untuk membedakan konteks dengan *International Non-Governmental Organisation* (INGO). Jika merujuk pada buku "*International Organizations*" yang ditulis oleh Clive Archer, IO didefinisikan sebagai suatu proses dan aspek perwakilan dari fase proses yang telah tercapai dalam periode waktu tertentu (Archer, 2014). Dalam pelaksanaannya, IGO dijalankan oleh negara anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut dengan menentukan operasional, memberikan *voting*, hingga memberikan pendanaan (Abidin, 2016).

Pada prinsipnya, IGO dipandang sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh negara berdaulat untuk mengutamakan kepentingan mereka di kancah regional maupun internasional, yang dalam mencapai tujuan tersebut, negara umumnya merangkul IGO sebagai lingkup yang memiliki prediktabilitas untuk konsultasi dan dialog dengan negara lain. Seperti yang diutarakan oleh David Law, IGO memiliki poin kekuatan yang cukup besar yang memungkinkannya menjalankan legitimasi pada suatu tindakan yang tidak dapat dilakukan sendiri olah suatu negara. IGO sendiri beroperasi dalam lingkungan kebijakan yang di dalamnya terdapat suatu *check and balance* untuk dapat menahan bahkan mencegah perilaku tidak menyenangkan dilakukan oleh negara anggota (Law, 2007).

IGO memainkan banyak peran dalam konteks hubungan internasional yang dapat memberikan banyak kontribusi dalam upaya kerja sama internasional. Beberapa peran yang umumnya dilakukan oleh IGO yaitu menyelesaikan sengketa atau perselisihan, membuat dan menetapkan prosedur, serta memberikan sifat memaksa pada anggotanya

untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Selain itu, IGO juga memiliki kontribusi dengan melakukan negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di antara negara anggota (Ertürk, 2015).

Salah satu contoh dari IGO yang eksis dalam era kontemporer seperti saat ini yaitu ASEAN. Organisasi ini merupakan suatu perkumpulan yang hanya memiliki jangkauan yurisdiksi pada suatu wilayah tertentu, karena terbentuk melalui suatu proses yang disebut sebagai regionalisme. Sebagaimana yang diuraikan oleh Mansfield dan Milner, regionalisme terbagi menjadi dua yaitu: (1) berdasarkan keterikatan geografis yang saling berdekatan satu sama lain dan dapat disebut sebagai koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik pada kawasan tersebut; (2) yaitu faktor non-geografis yang mengacu pada aktivitas suatu kelompok, baik itu pemerintah atau non-pemerintah, dan seperti organisasi regional umumnya berupa peningkatan level ekonomi dan politik pada negara yang tidak saling berdekatan antara satu dengan lainnya (Mansfield & Milner, 1999).

ASEAN juga dapat didefinisikan sebagai organisasi antarpemerintah regional yang bertujuan untuk memperkuat keterikatan ekonomi dan kerja sama keamanan di antara sepuluh negara anggotanya (Narine, 2009). Organisasi ini memiliki suatu upaya yang unik dalam mengeluarkan keputusan (*decision making*), yaitu dengan mengadakan sebuah konsultasi dan juga konsensus yang didasari pada prinsip tidak ikut campur urusan internal anggota dan penyelesaian konflik secara damai (Council on Foreign Relations, 2022; Haosheng & Canyu, 2022).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini umumnya merupakan suatu penelitian naturalistik yang digunakan untuk meneliti suatu objek alami dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci, yang nantinya akan cenderung menghasilkan makna dibandingkan generalisasi pada suatu topik yang akan diteliti (Ikbar, 2012) (Moleong, 2018).

Proses penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data (*data collecting*) baik primer maupun sekunder. Data dikumpulkan melalui riset berbasis internet (*internet-based research*) dan studi pustaka. Semua data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis yang nantinya menghasilkan jawaban pada permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021

Teori IGO seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa suatu organisasi memainkan beberapa kontribusi signifikan dalam konteks hubungan internasional, seperti penyelesaian sengketa, menetapkan suatu prosedur atau konsensus, serta memberikan sifat memaksa pada anggotanya untuk patuh pada mekanisme yang ada.

Akan tetapi, apa yang menjadi temuan sementara yaitu ASEAN telah menanggapi krisis kemanusiaan akibat kudeta di Myanmar dengan menandatangani konsensus terkait penyelesaian krisis di negara tersebut yang disepakati oleh semua negara anggota termasuk Myanmar. Namun, Myanmar justru tidak serius untuk melaksanakan konsensus tersebut dan melanjutkan tindakan yang berpotensi memperparah krisis kemanusiaan. Sehingga, kesimpulan sementara yaitu peran yang dilakukan oleh ASEAN belum optimal dalam menyelesaikan krisis tersebut karena Myanmar dapat secara langsung tidak mengindahkan konsensus yang telah disepakati bersama.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas, kudeta tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 2021. Pasukan militer Myanmar atau Tatmadaw, menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan atas pemerintahan di negara tersebut yang sebelumnya dipegang oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD) (A. Putri, Jasmine, Salma, Bagasta, & Faturrahman, 2021). Selain itu, Tatmadaw juga memberlakukan situasi darurat nasional (*national emergency situation*) selama satu tahun ke depan dengan memberikan jaminan bahwa akan digelar pemilihan umum ulang usai berakhirnya penetapan situasi tersebut (Amelia & Sukartik, 2022).

Selama periode darurat nasional itu, komandan tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing, akan menjadi Perdana Menteri negara tersebut. Ia didampingi oleh Wakil Presiden Myint Swe yang nantinya bertugas sebagai Presiden menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Win Myint dari kelompok sipil (India Today, 2021). Walaupun demikian, benang merah terjadinya kudeta tersebut sudah mulai terlihat pada malam 31 Januari 2021 ketika aparat militer menahan Aung San Suu Kyi dan petinggi partai NLD dengan todongan

senjata. Kemudian berlanjut pada penangkapan beberapa anggota parlemen terpilih dari partai NLD pada subuh keesokan harinya. Tindakan tersebut seolah mengulang kejadian serupa yang pernah dialami oleh partai NLD usai memenangi Pemilihan Umum 1990 yang hasilnya juga ditolak oleh kubu junta militer pada waktu itu (Thein-Lemelson, 2021).

Latar belakang terjadinya kudeta tersebut dapat ditelusuri hingga pelaksanaan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada 8 November 2020. Pemilihan tersebut merupakan kontes politik yang digelar untuk ketiga kalinya setelah tahun 2010 dan 2015 sebagai salah satu realisasi negara tersebut dalam melakukan transisi menuju demokrasi dan juga pemindahan kekuasaan secara damai (Htut, 2020).

Pemilihan dimenangkan oleh kubu demokrasi yaitu Partai NLD, yang tak lain merupakan pemenang pada Pemilu 2015, dengan raihan total 346 kursi atau di atas jumlah minimum 322 kursi sebagai syarat untuk memenangi pemilihan umum. Sementara nasib berbeda harus diterima oleh kubu oposisi yaitu Partai Persatuan dan Solidaritas Pembangunan (*Union Solidarity and Development Party*) (USDP) yang hanya meraup 33 suara saja (Khanthavit, 2022). Hanya berselang tiga hari usai berakhirnya pemilihan umum, kubu USDP menyatakan bahwa hasil pemilihan tersebut tidak sah dan sarat akan kecurangan yang terstruktur dan sistematis lalu kemudian menuntut agar dilaksanakan pemilihan ulang (BBC, 2020). Perlu diketahui bahwa partai USDP adalah partai politik yang dibentuk oleh para jenderal militer negara tersebut pada tahun 2010 dan menjadi tempat bernaung para politisi yang memiliki berlatar belakang militer. Hal ini berarti bahwa hubungan antara partai tersebut dengan militer tetap ada (Hopkins, 2020).

Myanmar Pasca Pemilu 2020 dan Awal Kudeta Militer 2021

Situasi pasca pemilihan tersebut mulai memanas ketika kubu militer secara terang-terangan mendukung partai USDP. Mereka mengumumkan akan melakukan tinjauan ulang terhadap dugaan penyimpangan versi mereka terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang tidak direspon secara baik oleh regulator pemilihan umum negara tersebut, *Union Election Commission* (UEC) (Bhattacharya & Raghuvanshil, 2021).

Selain melakukan tinjauan ulang, kubu militer kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu di 218 wilayah negara tersebut di wilayah aparat militer dan keluarganya turut ambil bagian dalam

pemungutan suara di hari pemilihan itu. Ditambah dengan meminta pada UEC untuk menyediakan bukti pendukung terkait dengan permintaan militer dalam melakukan penyelidikan kecurangan (Rugian, Niode, & Tulung, 2022).

Merespons permintaan kubu militer, pada 11 November 2020, UEC menyatakan bahwa pemilihan yang telah berlangsung dinyatakan sah dan tidak akan ada pemilihan ulang. Ditambah dengan pernyataan dari para pemantau (*observer*) internasional yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut tidak terdapat adanya suatu kecurangan. Setelah melakukan pemeriksaan internal militer, pada 23 Desember 2020 mengumumkan bahwa mereka menemukan adanya dugaan kecurangan sebanyak total 74,306 di empat daerah yaitu Aung Myay Tharzan, Yamethin, Pyawbye, dan Tanai, di tempt partai USDP mengalami kekalahan telak dari NLD (Kipgen, 2021).

Situasi memanas tidak sampai disitu saja. Pada 10 Januari 2021, sebanyak 160 anggota dewan parlemen yang berasal dari militer mengajukan proposal yang menuntut agar parlemen mengadakan sidang khusus yang membahas mengenai dugaan kecurangan dalam pemilihan umum. Langkah ini muncul di parlemen usai panglima tinggi militer mengeluarkan pernyataan melalui *video conference* bahwa telah terjadi praktik manipulasi pada pemilihan umum dan tindakan tersebut dapat merusak citra negara. Mereka juga menemukan kembali adanya ketidaksesuaian data pemilih sebanyak 4 juta yang tersebar di total 179 daerah. Data ini menjadi dasar legitimasi bagi militer untuk memaksa agar mereka mengadakan sesi sidang khusus di parlemen yang dijadwalkan pada 1 Februari 2021. Namun, permintaan militer tersebut ditolak oleh parlemen melalui rilis media sosial karena keputusan yang dikeluarkan oleh UEC sudah cukup untuk menetapkan bahwa hasil dari pemilihan umum 2020 sudah final (Kipgen, 2021).

Hal ini kemudian memunculkan ketegangan lain ketika kubu militer menyatakan bahwa kudeta militer mungkin akan kembali terjadi seperti pada beberapa dekade silam. Pernyataan tersebut secara gamblang dirilis oleh juru bicara militer. Brigadir Jenderal Zaw Min Tun menyatakan bahwa militer akan mematuhi konstitusi terkait negara dan akan mengambil tanggung jawab dalam melakukan kontrol negara (Reuters, 2021b).

Adapun konstitusi yang dimaksud yaitu Pasal 40c tentang Prinsip Dasar Negara

Republik Persatuan Myanmar (*Basic Principles of the Union Republic of Myanmar*). Pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan ditetapkannya situasi darurat nasional yang dapat membuat perpecahan dan disintegrasi nasional, maka pemerintahan dan kedaulatan negara secara sah dapat diberikan kepada pemimpin tertinggi angkatan bersenjata (militer) (Constitution of Myanmar, 2008). Menariknya, konstitusi negara tersebut, jika merujuk pada pembagian kekuasaan kepada anggota militer aktif, hampir serupa dengan konstitusi Indonesia yang dibuat pada tahun 1945 ketika negara itu merdeka (Renshaw, 2013).

Hal di atas sebagai preseden yang kemudian membuat militer negara tersebut menjustifikasi pelaksanaan kudeta militer pada pagi hari 1 Februari 2021. Kudeta dilaksanakan usai serangkaian 'drama' terkait hasil pemilihan umum yang tidak disukai oleh kubu militer dan juga sayap politiknya termasuk USDP (Ashadi, 2022).

Krisis Kemanusiaan Pasca Kudeta Militer 2021

Kudeta yang dilakukan Tatmadaw dengan pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing kemudian membuat lebih dari ratusan ribu masyarakat dari berbagai lapisan turun ke jalan. Mereka menolak adanya kudeta terhadap pemerintahan sipil yang terpilih secara sah dan demokratis melalui pemilihan umum dan juga menuntut agar pemimpin partai NLD, Aung San Suu Kyi, dibebaskan dari penahanan serta tuntutan untuk membentuk kembali pemerintahan sipil (Hanifahturahmi, Saudi, & Chaarnaillan, 2022).

Masyarakat kemudian melakukan protes hanya sehari setelah kudeta militer di ibukota Naypyitaw. Dimulai dengan protes besar-besaran di kota terbesar yaitu Yangon dengan membunyikan panci dan perkakas dapur hingga klakson mobil sebagai suatu cara untuk menolak adanya kudeta militer. Kemudian berlanjut keesokan harinya ketika para tenaga medis seperti dokter dan perawat, turut andil dalam demonstrasi anti-kudeta. Lalu mereka menyatakan membentuk suatu gerakan pembangkangan yang disebut sebagai *Civil Disobidience Movement* (CDM). CDM juga turut dilakukan oleh para staf kementerian seperti Kementerian Urusan Agama dan Budaya, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Drechsler, 2021). Gerakan tersebut dilakukan melalui pernyataan pembangkangan dan mogok kerja massal di sektor pegawai sipil sampai setidaknya pemerintahan yang terpilih secara

demokratis kembali dipulihkan. Selain itu Gerakan ini bertujuan untuk menekan rezim junta militer dari kalangan aparatur sipil (King, 2022).

Merespons berbagai protes oleh masyarakat, militer justru mengambil tindakan represif. Diawali dengan penyensoran jaringan internet dan pemutusan saluran telepon serta televisi, termasuk kanal media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan kanal lainnya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir suara penolakan terhadap kudeta yang dilakukan oleh junta militer yang memang semakin menggema di hampir seluruh wilayah di negara tersebut (Padmanabhan et al., 2021). Seolah tidak ingin tumbang karena adanya sensor besar-besaran oleh rezim junta militer, masyarakat sipil kemudian membentuk pemerintahan tandingan bernama *National Unity Government* (NUG). Tujuannya adalah untuk menyatukan kelompok penentang rezim junta militer, membuat semangat persatuan, menyusun agenda perlawanan, hingga menggalang dukungan internasional (Maizland, 2021).

Namun, segala upaya penolakan kudeta yang dilakukan oleh masyarakat tetap saja mengalami tindakan represif dari aparat militer. Tercatat aparat keamanan baik militer maupun kepolisian telah melakukan tindakan represif berupa penembakan, pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, penculikan, hingga penangkapan acak terhadap massa pelajar atau mahasiswa, jurnalis. Penindakan oposisi terhadap militer dengan menggunakan senjata berupa peluru tajam, granat, hingga gas air mata, yang ditujukan kepada para demonstran sipil. Tindakan represif tersebut jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan (Human Rights Watch, 2021). Tidak hanya itu, aparat militer juga melakukan penyerangan dan penindasan terhadap wilayah utara maupun selatan yang memang wilayah pinggiran (*marginalised area*).

Tercatat sejak awal kudeta, aparat keamanan telah membunuh kurang lebih sekitar 1,500 orang, termasuk 100 diantaranya anak-anak (Human Rights Watch, 2022). Dalam kurun waktu enam bulan pasca kudeta dan periode awal junta militer, situasi di Myanmar justru semakin memprihatinkan. Terdapat setidaknya lebih dari 1,000 orang tewas akibat dibunuh dan 5,900 yang mengalami penahanan oleh aparat keamanan. Selain itu, aspek kesehatan, ekonomi, maupun politik di negara tersebut mulai runtuh ditambah dengan tingginya

kasus pandemi Covid-19 di negara tersebut yang membuat keadaan semakin runyam (Molthof, 2012).

Pada 26 Maret, saluran televisi junta militer, MRTV, memperingatkan semua demonstran terkait dengan tragedi pembantaian yang dilakukan oleh aparat militer. Junta militer juga meminta agar setiap demonstran yang akan turun ke jalan untuk berpikir ulang, dan meminta kepada para orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya ikut berdemonstrasi. Pada hari berikutnya, aparat keamanan membunuh kurang lebih sekitar 160 orang, 78 di antaranya berasal dari wilayah Mandalay yang merupakan bekas ibu kota era Kerajaan Burma. Pembunuhan demi pembunuhan masih terus berlanjut, seperti yang terjadi pada 28 Maret ketika seorang aktivis veteran bernama Ah Khu, ditembak mati oleh aparat keamanan pada saat mengikuti demonstrasi di wilayah Sagaing (Lone, McPherson, Bhandari, & Naing, 2021).

Pembunuhan terhadap demonstran tersebut kemudian memunculkan banyak tanda tanya. Mengingat pada saat awal demonstrasi beberapa hari pasca kudeta, aparat keamanan masih dipersenjatai dengan senjata ringan. Namun belakangan mereka dibekali oleh senjata yang lebih mematikan seperti senapan serbu, senapan sniper, dan senapan mesin ringan. Menurut penuturan *Amnesty International*, aparat militer dan kepolisian mengadopsi taktik tembak untuk menekan protes dari kubu yang beroposisi dengan mereka (Amnesty International, 2021).

Respons ASEAN dan Kesepakatan *ASEAN Five Point Consensus*

Krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh kudeta militer di Myanmar ternyata mengundang perhatian dari dunia internasional. Tidak terkecuali dari ASEAN selaku organisasi kerja sama kawasan Asia Tenggara, dengan Myanmar sebagai salah satu anggotanya. ASEAN sendiri baru bertindak secara kolektif dalam menanggapi peristiwa tersebut dalam kurun waktu enam bulan pasca peristiwa terjadi. Pada awalnya negara-negara anggota tidak kompak dalam merespons peristiwa tersebut. Seperti Thailand yang menyatakan bahwa kudeta tersebut bukan merupakan urusannya. Sedangkan Malaysia dan Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam terkait tindak kekerasan pasca kudeta militer dan seruan untuk mengembalikan demokrasi (Dunst, 2021).

ASEAN cenderung lamban dalam merespons krisis kemanusiaan tersebut dan bahkan tidak memberikan kecaman langsung

terhadap rezim junta militer Myanmar, walaupun beberapa negara anggota seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia secara individu mengutuk adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh rezim junta militer Myanmar yang mengakibatkan krisis kemanusiaan. Hal ini dikarenakan ASEAN terganjal oleh prinsip yang disepakati oleh mereka sendiri, yang dapat disebut sebagai 'senjata makan tuan' bagi ASEAN (The Straits Times, 2021b).

Padahal, krisis kemanusiaan di Myanmar yang secara jelas memakan banyak korban jiwa itu memberikan suatu tantangan bagi ASEAN sekaligus dapat mengancam tujuan awal ASEAN. Tujuan ASEAN adalah menjaga kawasan Asia Tenggara dari segala bentuk intervensi luar dan mempromosikan kedamaian dan kestabilan kawasan secara jangka panjang. Ketidakmampuan ASEAN dalam menangani krisis tersebut juga rentan mengekspos konflik internal dalam tubuh organisasi ASEAN yang nantinya dengan mudah dapat dimasuki pengaruh eksternal seperti Amerika Serikat (AS) maupun Tiongkok (Ryu, Minn, & Mon, 2021).

Untuk menindaklanjuti dan menentukan langkah dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Myanmar akibat kudeta militer, ASEAN lalu mengadakan ASEAN *Leader's Meeting* (ALM) atau Pertemuan Tingkat Pemimpin ASEAN. Pertemuan ini diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 24 April 2021 dengan Brunei Darussalam selaku presidensi ASEAN periode 2021. Pertemuan tingkat pemimpin antar negara anggota ASEAN yang mengundang seluruh pemimpin negara anggota tidak terkecuali otak di balik terjadinya kudeta militer, yaitu Jenderal Min Aung Hlaing. Pertemuan tersebut terselenggarakan usai didorong penuh oleh dua negara anggota ASEAN yaitu Malaysia dan Indonesia. Kedua negara ini memandang bahwa ASEAN perlu untuk mengambil tindakan sebagai upaya untuk bertahan ditengah kecaman dunia internasional terhadap Myanmar yang nantinya dapat memberikan stigma negatif terhadap kredibilitas dari ASEAN itu sendiri (Vatikiotis, 2021).

Digelarnya Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN itu antara lain bertujuan untuk meredakan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar; menyatakan keprihatinan terhadap krisis yang terjadi; serta peran yang dapat dijalankan oleh ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi rumit yang ada. Pertemuan tersebut sebagai bentuk implementasi regionalisme pada kawasan

Asia Tenggara, seperti yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi (The Straits Times, 2021a).

Hadirnya jenderal militer Min Aung Hlaing dianggap sebagai secercah harapan untuk langsung memulai langkah jangka panjang terkait penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Dengan langkah awal berupa upaya untuk menghentikan berbagai kekerasan sekaligus berharap agar dapat berkoordinasi untuk memfasilitasi dialog kepada semua pihak di Myanmar baik itu pihak rezim junta militer maupun pihak pemerintahan sipil (Deutsche Welle, 2021).

Upaya awal yang menjadi penanda pertama oleh ASEAN pasca berakhirnya pertemuan tingkat pemimpin tersebut adalah menunjuk utusan khusus bagi Myanmar dan juga pemberian bantuan kemanusiaan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, semua pemimpin, termasuk Myanmar, sepakat untuk menyetujui lima poin yang menjadi konsensus ASEAN dalam upaya untuk menekan krisis kemanusiaan, yang kemudian dikenal sebagai ASEAN *Five Point Consensus*.

ASEAN *Five Point Consensus*. yaitu: (1) hentikan segala bentuk tindak kekerasan di Myanmar sesegera mungkin; (2) kewajiban dialog konstruktif bagi semua pihak untuk mencapai perdamaian dan demi kepentingan rakyat Myanmar; (3) kesediaan untuk memfasilitasi mediasi dan dialog terhadap semua pihak yang terlibat; (4) pemberian bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance*); dan (5) pengiriman utusan khusus untuk mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat (Association of Southeast Asian Nations, 2021b).

Peran ASEAN Pasca Kesepakatan ASEAN *Five Point Consensus*

Pertemuan tersebut mendapatkan apresiasi dari sebagian kalangan yang menganggap pertemuan tersebut penting bagi penyelesaian permasalahan dalam krisis kemanusiaan di Myanmar yang diakibatkan oleh kudeta militer pada 1 Februari 2021 (Nugraheny, 2021). Namun, pertemuan tersebut juga dikritik oleh pihak pemerintahan tandingan yang dibentuk oleh sipil, *National Unity Government* (NUG). ASEAN telah dianggap seolah memberikan legitimasi dan ‘karpet merah’ terhadap rezim junta militer yang telah melakukan pembunuhan terhadap rakyat yang menolak kudeta. Menurut NUG, ASEAN tidak perlu mengakui legitimasi pemerintahan junta

militer. Pada kesempatan yang sama, NUG juga menyatakan kekecewaannya pada ASEAN bahwa mereka tidak diundang pada pertemuan tersebut serta menyatakan bahwa segala upaya dan peran yang dilakukan ASEAN tidak akan pernah bisa diselesaikan jika hanya melakukan negosiasi dan dialog terhadap satu pihak saja (Reuters, 2021c).

Jika dilihat sekilas, memang benar bahwa apabila ASEAN turut memberikan legitimasi terhadap rezim junta militer Myanmar, maka secara tidak langsung ASEAN telah menolak hasil pemilihan umum yang secara jelas sudah final dan sah yang dimenangkan oleh partai NLD serta mengakui rezim *State Administration Council* (SAC) atau Dewan Administrasi Negara yang dibentuk oleh junta militer. Hal tersebut tentu mempersulit ASEAN sendiri untuk bisa membantu Myanmar kembali ke masa sebelum terjadinya kudeta. Jalan keluar satu-satunya yang mesti ditempuh oleh ASEAN yaitu terpaksa harus menekan rezim junta militer agar menyetujui pembagian kekuasaan dan kontrol atas pemerintahan negara yang diharapkan dapat mengembalikan Myanmar seperti pada saat sebelum kudeta (Nugroho, 2021).

Usai kembali dari mengikuti agenda ASEAN di Jakarta, Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan bahwa pihaknya tentu akan mengikuti hasil dari konsensus tersebut dengan mempertimbangkan untuk menegakkan stabilitas keamanan negaranya. Hal tersebut menjadi tanda tanya, sebab pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa rezim junta militer tidak serius untuk melakukan implementasi terhadap lima poin konsensus tersebut (Jaipragas, 2021).

Dugaan tersebut kemudian menjadi kenyataan ketika rezim junta militer terus melanjutkan pembantaian maupun penindasan terhadap masyarakat sipil alih alih menghormati lima poin yang ada pada konsensus yang ditetapkan pada pertemuan ASEAN tersebut. Bahkan, data pada bulan Mei 2022 menunjukkan bahwa rezim junta militer terus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dengan total 1,800 orang dan juga tindakan penangkapan paksa sebanyak lebih dari 1,075 orang ditambah dengan adanya teror pengeboman dan pembakaran terhadap masyarakat sipil yang dianggap anti-junta militer dan kaum minoritas (Nadi, 2022).

Menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh lembaga peneliti independen *Data for Myanmar*, rezim junta militer telah melakukan pembakaran terhadap setidaknya 11,417 rumah milik masyarakat sipil di 296

titik di seluruh Myanmar. Dampak terparah berada di daerah Sagaing Region, pada akhir bulan April atau hanya beberapa hari usai kesepakatan lima poin konsensus ASEAN (The Irrawaddy, 2022).

Lembaga independen seperti *Assistance Association for Political Prisoner in Burma* (AAPPB) juga merilis laporan bahwa hingga 1 Maret 2022 saja, atau sekitar 1 tahun lebih usai dimulainya kudeta militer, rezim junta militer telah membunuh kurang lebih sekitar 1589 orang dan melakukan penahanan terhadap lebih dari 9437 orang dengan 45 orang didalamnya telah divonis hukuman mati termasuk terhadap dua anak usia di bawah umur. Selain itu, sebanyak 1,973 orang juga berpotensi ditahan usai menghindari perintah penangkapan oleh aparat. Sedangkan bagi aktivis yang bersuara di luar negeri, 118 di antara mereka telah dijatuhi vonis secara *in absentia* dengan 39 orang didalamnya telah diancam hukuman mati secara *in absentia*. Dengan demikian, apabila mereka kembali ke Myanmar, mereka berpotensi untuk menghadapi regu tembak untuk dieksekusi mati. AAPPB juga menyatakan bahwa jumlah dalam laporan mereka kemungkinan masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah nyata. Hak ini dikarenakan sulitnya mendapatkan akses transparan dari pihak rezim junta militer (Assistance Association for Political Prisoners, 2022).

Rezim junta militer di Naypyitaw juga menolak untuk melakukan dialog yang dilakukan untuk mendamaikan semua pihak, akses kepada pemimpin politik yang ditahan, dan juga pengiriman bantuan kemanusiaan. Ini kemudian memicu ASEAN untuk gerak cepat dalam merealisasikan peran pasca konsensus tersebut dengan mengirimkan utusan khusus (*special envoy*) untuk negara tersebut yaitu Dato' Erywan Yusof, diplomat senior Brunei Darussalam (Garmabar, 2022). Ia dijadwalkan untuk melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar pada 14 Oktober 2021. Waktu kunjungannya tersebut sebenarnya cukup dekat dengan KTT ASEAN yang akan digelar di Brunei Darussalam pada akhir Oktober. Namun, ia terpaksa membatalkan kunjungannya usai rezim junta militer tidak memberikan akses masuk ke negara tersebut terutama untuk mengunjungi pemimpin partai NLD yang ditahan oleh rezim junta militer (Dalpino, 2022).

Dengan ditolaknya akses masuk utusan khusus ASEAN dan juga penolakan untuk melaksanakan dialog, yang menjadi satu-satunya harapan usai rezim junta militer tidak menunjukkan itikad baik dalam menghormati lima poin konsensus, maka hal tersebut

kemudian menjadi fase awal dari gesekan antara ASEAN dengan rezim junta militer. Hal ini sudah tentu membuat ASEAN semakin sulit untuk memainkan perannya dalam menghadapi situasi demikian (Utama, 2022).

Kemudian pada KTT ASEAN ke-39 yang digelar secara virtual pada tanggal 26-28 Oktober 2021 di Brunei Darussalam, blok regional tersebut secara mengejutkan memutuskan untuk mengecualikan rezim junta militer Myanmar untuk ambil bagian dari KTT tersebut usai rezim tersebut menolak untuk mengirimkan perwakilan non-politik sebagai perwakilan resmi negara tersebut. Sebagai gantinya, ASEAN mengundang Chin Aye, diplomat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar, sebagai perwakilan nonpolitik (*nonpolitical representative*) untuk Myanmar pada KTT tersebut (Lim & Yang, 2021).

Gesekan antara keduanya kembali memanas ketika KTT AS-ASEAN yang digelar di Washington D.C pada 12-13 Mei 2022. Myanmar kembali tidak diundang untuk ambil bagian dalam konferensi tersebut, selain mengundang Menteri Luar Negeri NUG, Zin Mar Aung, pada sesi informal konferensi tersebut (Cogan, 2022).

Konferensi tersebut juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan Myanmar. Pernyataan bahwa mereka tetap prihatin terhadap situasi di Myanmar yang semakin parah dan kembali meminta agar pihak yang berkuasa untuk menghormati dan mengimplementasikan poin-poin yang ada pada ASEAN *Five Point Consensus*, serta mendukung untuk menyerukan stabilitas dan keamanan pada kawasan Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, 2022a).

Menanggapi penolakan demi penolakan pada setiap agenda ASEAN, juru bicara rezim junta militer, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengecam bahwa pengucilan Myanmar pada forum resmi ASEAN menunjukkan bahwa blok regional tersebut telah tunduk pada tekanan dan intervensi asing seperti Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Myanmar juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap blok regional tersebut dengan menyatakan bahwa setiap hasil yang diraih melalui forum resmi ASEAN bertentangan dengan konsensus yang disepakati dan juga tujuan awal ASEAN (The Jakarta Post, 2021).

Menjelang akhir tahun 2021, posisi Dato' Erywan Yusof sebagai utusan khusus

ASEAN untuk Myanmar kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Hal yang menariknya, ia telah berkuasa di posisi itu selama lebih dari 30 tahun dan dapat dikatakan sebagai orang yang kurang begitu demokratis. Ia kemudian bertemu dengan pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, namun tidak menemui Aung San Suu Kyi yang sedang ditahan oleh rezim junta militer namun justru terkesan saling akrab satu sama lain mengingat bahwa Kamboja merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki relasi dekat dengan rezim Naypyitaw. Hal tersebut merupakan satu dari sekian sikap yang dimiliki negara anggota ASEAN dalam menyikapi permasalahan ini yang terkesan kukuh pada pendiriannya sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu indikator bahwa ASEAN secara tidak langsung mengakui bahwa konsensus yang disepakati tidak optimal dalam memainkan perannya untuk mengakhiri atau paling tidak, mengurangi krisis politik di Myanmar secara bertahap agar tidak segera berkepanjangan (Fumagalli, 2021).

SIMPULAN

Kudeta yang terjadi di Myanmar pada bulan Februari 2021 oleh kelompok militer menimbulkan krisis di beberapa aspek, salah satunya kemanusiaan. Peristiwa ini kemudian membuat ASEAN untuk turun tangan untuk melakukan penyelesaian terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Salah satu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh ASEAN yaitu dengan ditandatanganinya ASEAN *Five Point Consensus* oleh semua negara anggota termasuk Myanmar. Namun, alih-alih menghormati poin-poin yang ada pada konsensus tersebut, rezim junta militer justru cenderung mengabaikannya dan terus melakukan penindasan yang dapat memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi. Hal ini kemudian semakin mempersulit ASEAN untuk memainkan perannya pada penyelesaian krisis tersebut sehingga pada akhirnya ASEAN akan terkena getah pada konflik tersebut dan mengalami kerugian lebih banyak nantinya.

Secara garis besar, ASEAN telah menjalankan perannya sebagai organisasi regional sesuai dengan teori IGO di atas, selain memaksa negara anggotanya untuk patuh terhadap mekanisme yang berlaku. Terkait dengan konsensus yang ditandatangani untuk penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN cenderung dihadapkan pada keputusan yang sulit. Namun, jika ASEAN berani bertindak lebih dengan tetap memperhatikan prinsip konsensus tersebut, secara perlahan ASEAN dapat dipandang

sebagai organisasi yang berkekuatan baik di kawasan. Dengan demikian, setidaknya ASEAN dapat memainkan perannya dalam penyelesaian krisis yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas kawasan walaupun hanya sebatas konsensus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada program studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi saya untuk melakukan penelitian ini, kemudian kedua orang tua saya yang telah mendukung saya tanpa kenal lelah, juga kepada teman-teman yang tidak berhenti mendukung saya baik itu secara waktu dan moral. Penulis juga mengucap terima kasih kepada penerbit *Indonesian Journal of International Relations* yang telah berkenan untuk menerbitkan artikel penelitian ini.

REFERENSI

Abidin, S. Z. (2016). International Organisations. Retrieved November 23, 2022, from E-International Relations website: https://www.e-ir.info/2016/12/30/international-organisations/

Al Jazeera. (2021). Thousands of Myanmar protesters in standoff with police in Yangon. Retrieved October 3, 2022, from https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/thousands-of-myanmar-protesters-face-off-with-police-in-yangon

Ambarwati, A. (2022). Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar Pasca Kudeta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3360

Amelia, U. S., & Sukartik, D. (2022). Penerapan Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Kudeta Myanmar Di Media Online Kompas.Com. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)*, *4*(1), 1–13. https://doi.org/10.24014/jrmdk.v4i1.18498

Amnesty International. (2021). Myanmar: Evidence police deployed sub-machine guns against peaceful protesters, despite denials. Retrieved October 8, 2022, from Amnesty International website: https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/02/myanmar-evidence-police-machine-guns-protesters/

Archer, C. (2014). International organizations. In *International Organizations*. https://doi.org/10.4324/9781315751511

Ariffin, A. S., & Mohd Mahdzir, A. (2021).

Development And Achievements Of Science, Technology & Innovation Policy In ASEAN Countries: A Comparative Analysis Of Malaysia In Transition Stage With Myanmar, Cambodia And Laos In Developing Stage. *Journal of Science, Technology and Innovation Policy*. https://doi.org/10.11113/jostip.v7n1.67

Arifin, S. (2022). Abuse of Human Rights in Myanmar: An Urgent Appeal to Reinterpret the ASEAN Non-Interference Principle. *Human Rights in the Global South*, *1*(2), 128–144. https://doi.org/10.56784/hrgs.v1i2.12

Ashadi, W. (2022). Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah Journal*, *7*(2), 138–164. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.9316

Assistance Association for Political Prisoners. (2022). Daily Briefing in Relation to the Military Coup. Retrieved October 9, 2022, from Assistance Association for Political Prisoners website: https://aappb.org/?p=20349

Association of Southeast Asian Nations. (2021a). ASEAN Chairman's Statement on The Developments in The Republic of The Union of Myanmar. Retrieved October 3, 2022, from https://asean.org/asean-chairmans-statement-on-the-developments-in-the-republic-of-the-union-of-myanmar-2/

Association of Southeast Asian Nations. (2021b). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting. Retrieved October 10, 2022, from Association of Southeast Asian Nations website: https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2022a). ASEAN-U.S. Special Summit, 2022 Joint Vision Statement. Retrieved October 8, 2022, from Association of Southeast Asian Nations website: https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-ASEAN-US-Special-Summit-2022-Joint-Vision-Statement.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2022b). ASEAN Chairman's Statement on the Situation in Myanmar. Retrieved October 3, 2022, from https://asean.org/asean-chairmans-statement-on-the-situation-in-myanmar/

BBC. (2020). Myanmar: Aung San Suu Kyi's party wins majority in election. Retrieved October 8, 2022, from BBC website: https://www.bbc.com/news/world-asia-54899170

Bhattacharya, S., & Raghuvanshil, S. (2021). Political Turmoil, Leadership Fiasco and Economic Fallout of Myanmar Crisis in 2021. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, *4*(3), 30–32.

Cogan, M. S. (2022). Interpreting Myanmar's conspicuous absence from the US –

ASEAN Summit. Retrieved October 9, 2022, from Thai Enquirer website: https://www.thaienquirer.com/40162/interpreting-myanmars-conspicuous-absence-from-the-us-asean-summit/

Constitution of Myanmar. *Myanmar Constitution 2008*. , (2008). Constitution of Myanmar.

Council on Foreign Relations. (2022). What is ASEAN? Retrieved November 26, 2022, from Council on Foreign Relations website: https://www.cfr.org/backgrounder/what-asean

Cuyvers, L. (2019). The 'ASEAN Way' and ASEAN's development gap with Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam: a critical view. *Asia Pacific Business Review*, *25*(5), 683–704. https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1652980

Dalpino, C. (2022). US-Southeast Asia Relations: Myanmar Spirals Downward While Asean Drifts. *Comparative Connection: A Triannual E-Journal of Bilateral Relations in the Indo-Pacific*, *23*(3).

Deutsche Welle. (2021). KTT ASEAN 2021: Dialog Tidak Akan Cukup Menyelesaikan Konflik di Myanmar. Retrieved October 9, 2022, from Deutsche Welle website: https://www.dw.com/id/dialog-tidak-akan-cukup-menyelesaikan-konflik-di-myanmar/a-57314791

Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Darmawan, W. B. (2022). Myanmar and the Dilemma of Asean Interventions that Do not Find the Bright Spot. *Baltic Journal of Law and Politics*, *15*(1), 618–633. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00042

Drechsler, W. (2021). New development: Myanmar's civil service—Responsible disobedience during the 2021 military coup. *Public Money and Management*, *41*(7), 1–4. https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1928948

Dunst, C. (2021). The Myanmar Coup as an ASEAN Inflection Point. *Journal of Indo-Pacific Affairs, Special Issue*, 37–43. Retrieved from https://media.defense.gov/2021/Aug/26/2002840264/-1/-1/1/DUNST.PDF

Ertürk, E. (2015). Intergovernmental Organizations (Igos) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health and Envıronment. *Journal of International Social Research*, *8*(37), 333–340. https://doi.org/10.17719/jisr.20153710606

Fumagalli, M. (2021). Myanmar 2021: Repression and Resistance In A Multi-Cornered Conflict. *Asia Maior*, *32*, 259–276. Retrieved from https://research-repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/26003/11_AM2021_Myanmar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Garmabar, P. (2022). Respon Dunia

Terhadap Kudeta Militer Myanmar. *Review of International Relations*, *3*(2), 179–188. https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.25166

Hanifahturahmi, H., Saudi, A., & Chaarnaillan, A. (2022). Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer Di Myanmar. *Jurnal Trias Politika*, *6*(1), 57–69. https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3963

Haosheng, D., & Canyu, L. (2022). The Role, Achivements And Challenges Of The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN). *International Organizations: Serbia and Contemporary World*, *2*(4), 73–85. https://doi.org/10.18485/iipe_ioscw.2022.2.ch4

Hopkins, D. (2020). Myanmar's military-backed opposition party stares into political abyss. Retrieved October 8, 2022, from The Interpreter website: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/myanmar-s-military-backed-opposition-party-stares-political-abyss

Htut, Y. (2020). The 2020 Myanmar General Election: Another Turning Point? *Southeast Asian Affairs*, 255–272.

Human Rights Watch. (2021). Myanmar: Coup Leads to Crimes Against Humanity. Retrieved October 8, 2022, from Human Rights Watch website: https://www.hrw.org/news/2021/07/31/myanmar-coup-leads-crimes-against-humanity

Human Rights Watch. (2022). Myanmar: Year of Brutality in Coup's Wake. Retrieved October 8, 2022, from Human Rights Watch website: https://www.hrw.org/news/2022/01/28/myanmar-year-brutality-coups-wake

Ikbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: Refika Aditama.

India Today. (2021). Military stages coup in Myanmar, Suu Kyi, other senior figures detained. Retrieved October 2, 2022, from India Today website: https://www.indiatoday.in/world/story/myanmar-s-aung-san-suu-kyi-other-senior-figures-detained-in-late-night-raid-ruling-party-1764585-2021-02-01

Iqbal, F. M., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, *3*(1), 113–129. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541

Jaipragas, B. (2021). Myanmar's junta to consider Asean's five-point consensus after 'stabilising' the country. Retrieved October 9, 2022, from South China Morning Post website: https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3131248/myanmars-junta-consider-aseans-five-point-consensus-after

Khanthavit, A. (2022). The Effects of Myanmar's 2020 General Election and 2021 Military Coup on Stock Market Returns. *Thailand and the World*

Economy, *40*(3), 1–14. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/261132

King, A. S. (2022). Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government. *Religions*, *17*(7), 594–600. https://doi.org/10.3390/rel13070594

Kipgen, N. (2021). The 2020 Myanmar Election And The 2021 Coup: Deepening Democracy Or Widening Division? *Asian Affairs*, *52*(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1886429

Kusumawardhana, I. (2022). Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi "Lima Poin Konsensus ASEAN" tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. *Indonesian Perspective*, *7*(1), 1–13. https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48592

Law, D. (2007). Intergovernmental Organisations and their Role in Security Sector Reform. In *Intergovernmental Organisations and Security Sector Reform* (pp. 3–24). Zurich: LIT Verlag.

Lim, P. H., & Yang, L. (2021). ASEAN Summit Opens Without Myanmar Presence. Retrieved October 9, 2022, from VOA website: https://www.voanews.com/a/asean-summit-opens-without-myanmar-presence-/6286818.html

Lone, W., McPherson, P., Bhandari, A., & Naing, S. (2021). Protest drove a generation to Myanmar's streets. Retrieved October 8, 2022, from Reuters website: https://graphics.reuters.com/MYANMAR-POLITICS/zjpqkkoaqpx/

Lukito, J., Cui, Z., Hu, A., Lee, T., & Ozawa, J. V. S. (2022). States vs. Social Movements: Protests and State Repression in Asia. *Media and Communication*, *10*(4), 5–17. https://doi.org/10.17645/mac.v10i4.5623

Maizland, L. (2021). Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict. Retrieved October 8, 2022, from Council on Foreign Relations website: https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya#chapter-title-0-2

Mansfield, E. D., & Milner, H. V. (1999). The new wave of regionalism. *International Organization*, *53*(3), 589–627. https://doi.org/10.1162/002081899551002

Manurung, H. (2021). Myanmar Political Instability: A Threat to Southeast Asia Stability. *Jurnal Asia Pacific Studies*, *5*(1), 22–35. https://doi.org/10.33541/japs.v5i1.2671

McCormick, J. M. (1980). Intergovernmental Organizations and Cooperation among

Nations. *International Studies Quarterly*, *24*(1), 75–98. https://doi.org/10.2307/2600129

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. In *PT Remaja Rosdakarya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Molthof, M. (2012). ASEAN and the Principle of Non-Interference. Retrieved October 8, 2022, from E-International Relations website: https://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/#:~:text=ASEAN's principle of non-interference has allowed the member-states,cooperative ties with other states.

Muhammad, A., & Sahide, A. (2022). Asean's Response To The Myanmar Military Coup: From Nonintervention To Responsibility To Protect. *Revista UNSCI Journal*, (59), 43–58.

Nadi, K. (2022). How ASEAN's Failed "Five-Point Consensus" Has Let Down the People of Myanmar. Retrieved October 9, 2022, from The Wire website: https://thewire.in/south-asia/how-aseans-failed-five-point-consensus-has-let-down-the-people-of-myanmar

Narine, S. (2009). ASEAN in the twenty-first century: A sceptical review. *Cambridge Review of International Affairs*, *22*(3), 369–386. https://doi.org/10.1080/09557570903104065

National Public Radio. (2021). Myanmar Coup: With Aung San Suu Kyi Detained, Military Takes Over Government. Retrieved October 2, 2022, from Myanmar Coup: With Aung San Suu Kyi Detained, Military Takes Over Government. website: https://www.npr.org/2021/02/01/962758188/myanmar-coup-military-detains-aung-san-suu-kyi-plans-new-election-in-2022

Nugraheny, D. E. (2021). ASEAN Leaders Meeting Bahas Nasib Myanmar, Pemimpin Junta Militer Hadir di Jakarta? Retrieved October 9, 2022, from Kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/24/11284781/asean-leaders-meeting-bahas-nasib-myanmar-pemimpin-junta-militer-hadir-di

Nugroho, J. (2021). Indonesia gambles on special ASEAN summit on Myanmar. Retrieved October 10, 2022, from The Interpreter website: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-gambles-special-asean-summit-myanmar

Padmanabhan, R., Filastò, A., Xynou, M., Raman, R. S., Middleton, K., Zhang, M., … Dainotti, A. (2021). A multi-perspective view of Internet censorship in Myanmar. *FOCI 2021 - Proceedings of the 2021 Workshop on Free and Open Communications on the Internet*. https://doi.org/10.1145/3473604.3474562

Perry, P. J. (2021). Ne Win's Burma and its Contexts: socialist and military. In

Myanmar (Burma) since 1962: the Failure of Development. https://doi.org/10.4324/9781315248462-3

Putri, A., Jasmine, P., Salma, R., Bagasta, G., & Faturrahman, M. P. (2021). Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar. *Nation State: Journal of International Studies*, *4*(1), 117–139. https://doi.org/10.24076/nsjis.v4i1.488

Putri, R. H., Nugraha, Y. C., & Akbar, A. (2022). The Role of the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in Protecting Human Rights Related to the Coup Conflict in Myanmar. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(1), 7295–7305.

Quinn, C. (2022). Myanmar's Meaningless Five-Point Consensus. Retrieved October 4, 2022, from https://foreignpolicy.com/2022/05/11/myanmar-five-point-consensus-asean/

Ra, D., Kham, S. S., Barbesgaard, M., Franco, J. C., & Vervest, P. (2021). The politics of Myanmar's agrarian transformation. *Journal of Peasant Studies*. https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1901689

Rae, N. F. N. (2022). *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Militer Pada Kudeta Militer Myanmar Menurut Hukum Ham Internasional*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Renshaw, C. S. (2013). Democratic Transformation and Regional Institutions: The Case of Myanmar and ASEAN. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *32*(1), 29–54. https://doi.org/10.1177/186810341303200102

Reuters. (2021a). "Everything will be OK": slain Myanmar teen's T-shirt slogan spurs defiance.

Reuters. (2021b). Myanmar army warns may "take action" over its election dispute. Retrieved October 8, 2022, from Reuters website: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-military-idUSKBN29V1HI

Reuters. (2021c). Myanmar unity government says it must be part of any ASEAN bid to end crisis. Retrieved October 9, 2022, from Reuters website: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-idAFKBN2C504E

Rugian, F. E., Niode, B. N., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan & Politik*, *7*(2), 36–42. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2105

Ryu, Y., Minn, B., & Mon, M. M. (2021). The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Values. Retrieved October 8, 2022, from ISEAS Yusof Ishak

Institute website: https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-27-the-military-coup-in-myanmar-time-to-prioritise-asean-centrality-and-communal-values-by-yongwook-ryu-bernard-minn-and-myat-myat-mon/

Sirijintana, W. (2022). *Putting ASEAN to Test : The Roles and Challenges of Resolving the Myanmar Political Crisis After the 2021 Coup*. *1*(2), 1–16.

Stokke, K. (2019). Political Representation by Ethnic Parties? Electoral Performance and Party-Building Processes among Ethnic Parties in Myanmar. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. https://doi.org/10.1177/186810341989 3530

Thawnghmung, A. M., & Noah, K. (2021). Myanmar's military coup and the elevation of the minority agenda? *Critical Asian Studies*. https://doi.org/10.1080/14672715.202 1.1912620

The Irrawaddy. (2021). Myanmar Junta's Caretaker Government Follows in Footsteps of Former Dictator Ne Win. Retrieved October 3, 2022, from https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/myanmar-juntas-caretaker-government-follows-in-footsteps-of-former-dictator-ne-win.html

The Irrawaddy. (2022). Over 11,000 Houses Burned Down in Myanmar Junta Attacks Since Coup. Retrieved October 8, 2022, from The Irrawaddy website: https://www.irrawaddy.com/news/burma/over-11000-houses-burned-down-in-myanmar-junta-attacks-since-coup.html

The Jakarta Post. (2021). Myanmar junta blames "foreign intervention" for ASEAN summit exclusion. Retrieved from The Jakarta Post website: https://www.thejakartapost.com/world/2021/10/17/myanmar-junta-blames-foreign-intervention-for-asean-summit-exclusion.html

The Straits Times. (2021a). Asean leaders gather in Jakarta with junta leader in bid to end Myanmar crisis. Retrieved October 9, 2022, from The Straits Times website: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-leaders-gather-in-jakarta-with-junta-leader-in-bid-to-end-myanmar-crisis

The Straits Times. (2021b). Singapore expresses "grave concern" over Myanmar's political crisis. Retrieved October 8, 2022, from The Straits Times website: https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-expresses-grave-concern-over-myanmars-political-crisis

Thein-Lemelson, S. M. (2021). 'Politicide' and the Myanmar coup. *Anthropology Today*, *37*(2), 3–5. https://doi.org/10.1111/1467-8322.12639

Utama, M. A. (2022). Solidarity for Myanmar: #MilkTeaAlliance Indonesia's Transnational Activism in Pr ansnational Activism in Pressuring the Go essuring the Government of

ernment of Indonesia and ASEAN. *Global: Jurnal Politik Internasional*, *24*(2), 205–226. https://doi.org/10.7454/global.v24i2.1257

Vatikiotis, M. (2021). Myanmar crisis highlights ASEAN's identity dilemma. Retrieved October 9, 2022, from Nikkei Asia website: https://asia.nikkei.com/Opinion/Myanmar-crisis-highlights-ASEAN-s-identity-dilemma

Widayat, I. A. R., & Surwandono, S. (2022). Evaluation on Humanitarian Intervention in Myanmar: Is It a Placebo Effect? *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *9*(12), 249–261. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4225